



EVALUASI EFEKTIVITAS DEKLARASI PANMUNJOM DALAM PROSES DENUKLIRISASI SEMENANJUNG KOREA

Brigitha Leovani Pailo^{*1}, Agussalim Burhanuddin²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

^{*}Korespondensi Author: brighthaleovanipailo04@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 02 Desember 2023</p> <p>Revised : 11 Januari 2024</p> <p>Accepted : 03 Februari 2024</p> <p>Publication : 29 Februari 2024</p> <p>Keywords: <i>Denuclearization, Korean Peninsula, Panmunjom Declaration, Regional Security Complex Theory, Security</i></p> <p>Kata Kunci: Deklarasi Panmunjom, Denuklirisasi, Keamanan, Semenanjung Korea, Teori Regional Security Complex.</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract : <i>This study evaluates the Panmunjom Declaration's effectiveness in the Korean Peninsula's denuclearization process. This study uses a qualitative approach with an analysis of literature and case studies to assess the achievements, challenges, and implications of the existence of the Panmunjom Declaration, as well as the data collection method and type of secondary data used. The Panmunjom Declaration, signed on 27 April 2018 by the leaders of North and South Korea, pledges to work together towards peace, stability, and complete denuclearization in the region. The results show that while the Panmunjom Declaration created positive momentum for dialogue and reduced tensions on the Korean Peninsula, progress on denuclearization has been limited. This study highlights the complexity of security, political, and economic dynamics in the Korean Peninsula region. Major obstacles include lack of trust, divergent strategic interests, and international political dynamics. The study concludes that the Panmunjom Declaration requires more concrete and comprehensive efforts to achieve its ultimate goal. Policy recommendations, including increased multilateral diplomacy, are expected to encourage North Korea's commitment to denuclearization.</i></p> <p>Abstrak : Studi ini mengevaluasi efektivitas Deklarasi Panmunjom dalam proses denuklirisasi Semenanjung Korea. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis pada literatur dan studi kasus untuk menilai pencapaian, tantangan, dan implikasi dari adanya Deklarasi Panmunjom, dengan metode pengumpulan data dan jenis data yang digunakan adalah sekunder. Deklarasi Panmunjom, yang ditandatangani pada 27 April 2018 oleh pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan, berjanji untuk bekerja sama menuju perdamaian, stabilitas, dan denuklirisasi penuh (<i>complete denuclearization</i>) di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Deklarasi Panmunjom menciptakan momentum positif untuk dialog dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea, kemajuan dalam proses denuklirisasi nyatanya masih terbatas. Studi ini menyoroti kompleksitas dinamika keamanan, politik, dan ekonomi di kawasan Semenanjung Korea. Faktor-faktor seperti kurangnya kepercayaan, kepentingan strategis yang berbeda, dan dinamika politik internasional menjadi hambatan utama. Studi ini menyimpulkan bahwa saat ini Deklarasi Panmunjom memerlukan upaya tambahan yang lebih konkret dan komprehensif untuk mencapai tujuan akhir yang seutuhnya. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan diplomasi multilateral diharapkan mampu untuk mendorong komitmen Korea Utara dalam proses denuklirisasi.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Semenanjung Korea telah lama menjadi pusat perhatian internasional karena konflik berkepanjangan yang terjadi dan isu nuklir yang mengancam stabilitas regional dan global. Perang Korea merupakan konflik saudara yang terjadi pada 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Konflik ini juga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu perang *proxy* yang terjadi selama Perang Dingin, setelah berakhirnya Perang Dunia II (Aditama, 2017).

Pertempuran yang berlangsung selama tiga tahun ini melibatkan Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea) yang didukung oleh negara-negara komunis seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet –kini Rusia, melawan Korea Selatan (Republik Korea) yang didukung oleh negara-negara demokrasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perang ini mengakibatkan kehancuran di kedua belah pihak. Perang Korea berakhir pada 27 Juli 1953 ketika Amerika Serikat, Republik Rakyat China -kini Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani perjanjian gencatan senjata (Fitri, 2019) (Suhardi et al., 2022, 272-273). Akan tetapi, Presiden Korea Selatan saat itu, Syngman Rhee, menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut kendatipun berjanji untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata yang ada. Akan tetapi, pada faktanya perang ini belum resmi berakhir dan ketegangan masih sering terjadi di Semenanjung Korea.

Korea Utara, dengan program nuklirnya yang kontroversial, telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi Korea Selatan, negara-negara tetangga, dan komunitas internasional. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi nuklir, Korea Utara mulai mengembangkan teknologi tersebut menjadi senjata nuklir. Diawali pada tahun 1966 ketika Kim Il Sung memerintahkan pemasangan hulu ledak nuklir pada misil. Langkah ini lalu diikuti dengan uji coba ledakan besar, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam pembuatan bom nuklir. Pada tahun 2006, melalui Korean Central News Agency (KCNA) Korea Utara secara resmi mengumumkan uji coba senjata nuklir pertamanya (Permata, 2018, 107).

Menurut Gastelum (2012), pelucutan nuklir adalah proses pengurangan jumlah dan/atau kapabilitas militer, senjata, serta kekuatan nuklir. Sementara itu, denuklirisasi merujuk pada usaha untuk menghapus seluruh infrastruktur yang dapat digunakan dalam produksi senjata nuklir. Upaya untuk denuklirisasi di semenanjung ini telah berlangsung selama beberapa dekade, melibatkan berbagai negosiasi dan perjanjian, namun sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Dunia menginginkan

penghentian secara total oleh Korea Utara dengan program nuklirnya, melalui rezim NPT (*Non-Proliferation Treaty*) (Permata, 2018, 108).

Deklarasi Panmunjom, yang ditandatangani pada 27 April 2018 oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in di “*Peace House*” yang terletak di Desa Panmunjom, kemudian menjadi tonggak penting dalam upaya denuklirisasi dan peningkatan hubungan antar kedua Korea. Pertemuan ini juga menjadi momentum pertemuan antara kedua kepala negara, setelah terakhir kali diadakan pada tahun 2007. Deklarasi Panmunjom mencakup komitmen untuk mengakhiri permusuhan, meningkatkan kerja sama ekonomi, dan, yang paling krusial, mencapai denuklirisasi lengkap (*complete denuclearization*) di Semenanjung Korea. Dokumen ini dianggap sebagai langkah bersejarah menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

Sayangnya, meskipun Deklarasi Panmunjom menandai sebuah momentum positif, efektivitasnya dalam menggerakkan proses denuklirisasi mendapat respon skeptis sebab rekam jejak Korea Utara yang mencerminkan ketidakpatuhan. Berbagai faktor, termasuk ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, dinamika politik domestik dan internasional, serta kepentingan strategis yang berbeda, mempengaruhi implementasi deklarasi ini. Selain itu, langkah-langkah konkret yang diambil pasca-deklarasi untuk mencapai denuklirisasi masih terbatas dan kerap mengalami hambatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Lam'anah dan Muhammad Faizal Alfian (2023), yang dituliskan dalam jurnal “*Analisis Ketidakefektifan Deklarasi Panmunjom Sebagai Upaya Reunifikasi Semenanjung Korea*” membahas bahwasannya Korea Utara memiliki persepsi buruk terhadap Korea Selatan sejak Semenanjung Korea terpecah. Persepsi ini diperparah ketika PBB mengesahkan Korea Selatan sebagai satu-satunya negara yang sah dan karena kedekatan hubungan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Keyakinan ini tetap bertahan meskipun bertentangan dengan kenyataan, menunjukkan konsistensi kognitif di mana Korea Utara tetap berpegang pada pandangannya.

Penelitian ini menunjukkan bagaimana proses kognitif dapat mempengaruhi penilaian yang irasional, menyebabkan distorsi perseptual dan interpretasi yang tidak akurat. Ketegangan antara kedua negara semakin diperburuk oleh tindakan irasional Korea Utara, seperti meledakkan kantor penghubung antar Korea pada tahun 2018 dan memutus hubungan dengan Korea Selatan secara sepihak (Lam'anah & Alfian, 2023).

Hal yang tak jauh berbeda juga dijelaskan oleh Dewi Astuti Mudji, Tino Rila Sebayang, dan Fathira Iftihani N (2022) melalui jurnal "*Motif Perilaku Korea Utara Mengingkari Deklarasi Panmunjom Ditinjau dari Regional Security Complex Theory*", Pada tahun 2019, Korea Utara secara konsisten terus mengembangkan program nuklirnya, dipicu oleh ancaman sanksi dan embargo dari Amerika Serikat, yang dianggap bertentangan dengan Deklarasi Panmunjom.

Peran Tiongkok sebagai mitra ekonomi Korea Utara sangat signifikan dalam mempertahankan ekonominya. Jika sanksi tidak dicabut, ekonomi Korea Utara akan semakin terpuruk. Sebaliknya, Korea Utara tidak ingin mengurangi senjata nuklirnya yang dianggap penting untuk pertahanan negara. Setelah serangan propaganda kelompok pembelot di perbatasan, Korea Utara merespon dengan meledakkan kantor penghubung yang didirikan pada tahun 2018 untuk membantu komunikasi satu sama lain. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Panmunjom, yang dibuat untuk mengurangi ketegangan militer dan menghentikan propaganda. Kekecewaan Korea Utara terhadap ketidakmampuannya mencegah aksi pembelot tersebut mendorongnya untuk membalas tindakan tersebut terhadap Korea Selatan (Mudji et al., 2022).

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan Teori *Regional Security Complex*. Teori ini, yang diperkenalkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver, menekankan pada keterkaitan dan interdependensi keamanan di antara negara-negara dalam suatu kawasan geografis tertentu. Gagasan ini menggarisbawahi ketergantungan timbal balik dan interaksi di antara negara-negara dan aktor-aktor di dalam kompleks keamanan regional, yang membentuk lingkungan keamanan dan mempengaruhi dinamika konflik dan kerja sama. Definisi awal kompleks keamanan (*security complex*) menurut Buzan (1983: 106) adalah: 'sekelompok negara dengan masalah keamanan utamanya yang saling terkait erat sehingga keamanan nasional mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain'.

Dalam buku mereka tahun 1998 (Buzan dan Wæver 1998: 201), definisi kompleks keamanan regional (*Regional Security Complex*) diperbarui untuk mengurangi fokus negara-sentris dan militer-politik, serta untuk mencakup berbagai aktor dan sektor keamanan: 'sekelompok unit yang proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau keduanya sangat terkait sehingga masalah keamanan mereka tidak bisa dianalisis atau diselesaikan secara terpisah satu sama lain' (Buzan & Wæver, 2003: 44).

Lebih lanjut, Teori *Regional Security Complex* menggabungkan gagasan sekuritisasi, yang mengacu pada proses di mana masalah atau aktor tertentu dikonstruksi sebagai ancaman keamanan eksistensial, sehingga melegitimasi langkah-langkah luar biasa untuk mengatasinya (Doll, 2021). Konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana isu-isu keamanan dibingkai dan ditangani dalam konteks regional, yang menjelaskan dinamika persepsi dan respon terhadap ancaman (Farzayee, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, Teori *Regional Security Complex* digunakan untuk menganalisis beberapa aspek penting. Deklarasi Panmunjom sebagai hasil dari negosiasi diplomatik antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta pengaruh dari aktor-aktor lain, dapat dianalisis sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan bersama di kawasan ini. Kesepakatan dan pelanggaran terhadap deklarasi tersebut mencerminkan dinamika kompleks keamanan di Semenanjung Korea.

Melalui analisis berbagai peristiwa dan kebijakan yang muncul setelah penandatanganan deklarasi, penelitian ini hendak mengevaluasi efektivitas Deklarasi Panmunjom dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika denuklirisasi di Semenanjung Korea serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan masa depan yang lebih efektif. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam diskusi akademis dan praktis mengenai perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Timur.

METHOD

Studi ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi yang mengkaji berbagai referensi dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh landasan teori terkait masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006) (Sari & Asmendri, 2020, 43).

Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber literatur seperti laporan resmi, artikel, buku, jurnal, dan e-book, dan lainnya untuk memberikan dukungan sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, yang menjelaskan evaluasi efektivitas Deklarasi Panmunjom dalam proses denuklirisasi Semenanjung Korea.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil

Dinamika Semenanjung Korea Pasca Penandatanganan Deklarasi Panmunjom

Dalam upayanya untuk memulai kembali pembicaraan dengan Korea Utara sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in membuka peluang untuk deklarasi yang diharapkan dapat mengakhiri keadaan perang yang secara teknis telah berlangsung sejak tahun 1950-an. Dalam keadaan formal, Korea Selatan dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Amerika Serikat masih dalam keadaan berkonflik dengan Korea Utara pasca Perang Korea 1950-1953, yang tidak berakhir dengan perjanjian damai tetapi dengan gencatan senjata. Seoul kemudian melihat “Deklarasi Panmunjom” sebagai cara untuk membangun kepercayaan, memulai kembali perundingan denuklirisasi dan pada akhirnya mengamankan perjanjian damai yang bertahan lama.

Tahun 2018 menjadi momen bersejarah bagi hubungan antar-Korea dengan diadakannya pertemuan yang menghasilkan Deklarasi Panmunjom pada 27 April 2018. Pertemuan ini menandai perubahan dalam hubungan kedua negara yang sebelumnya tegang ke arah yang mulai terbuka. Deklarasi tersebut menetapkan nilai-nilai utama yang bertujuan untuk perdamaian, termasuk komitmen untuk mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian permanen. Adapun poin-poin utama yang terkandung dalam deklarasi tersebut, di antaranya:

- 1) Denuklirisasi, Korea Selatan dan Korea Utara menegaskan komitmen bersama untuk mencapai *complete denuclearization*, menjadikan Semenanjung Korea zona bebas nuklir.
- 2) Rezim Perdamaian, kedua negara sepakat untuk secara aktif mendorong pertemuan trilateral dengan Amerika Serikat, atau pertemuan empat pihak dengan Tiongkok, guna mengakhiri Perang Korea, menghentikan gencatan senjata dengan perjanjian perdamaian, dan membentuk rezim perdamaian yang permanen dan stabil.
- 3) Kunjungan ke Pyongyang, para pemimpin setuju untuk melakukan pertemuan rutin dan percakapan via telepon. Dalam hal ini, Presiden Moon Jae-In sepakat untuk mengunjungi Pyongyang pada musim gugur.
- 4) Reuni Keluarga, Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk melanjutkan program reuni bagi keluarga yang terpisah akibat konflik.
- 5) Penggabungan Kekuatan Olahraga, kedua pihak setuju untuk bersatu dalam acara olahraga internasional di bawah satu bendera, yaitu bendera unifikasi Korea di mana

mereka menunjukkan kebijaksanaan, bakat, dan solidaritas, seperti pada ajang Asian Games 2018.

- 6) Perlucutan Senjata, Korea Selatan dan Korea Utara mencapai kesepakatan untuk memulai perlucutan senjata secara bertahap sebagai hasil dari penurunan ketegangan militer dan kemajuan yang signifikan dalam membangun kepercayaan militer, serta
- 7) Tidak Ada Lagi Perang, pemimpin kedua Korea dengan tegas mengumumkan kepada 80 juta orang Korea dan orang di seluruh dunia bahwa perang di Semenanjung Korea tidak akan terjadi lagi, menandai era baru perdamaian (Agence France-Presse, 2018).

Melihat tren kala itu, Deklarasi Panmunjom awalnya menciptakan harapan positif bagi proses perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Terdapat beberapa langkah positif yang diambil oleh kedua Korea, termasuk pertemuan puncak tambahan, pembukaan kantor penghubung bersama, dan penghentian sementara uji coba nuklir serta peluncuran rudal oleh Korea Utara. Namun, perkembangannya tidak berlanjut secara konsisten.

Meski dikatakan ada langkah-langkah awal yang positif, implementasi deklarasi ini mengalami stagnasi. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan yang konkret terkait langkah-langkah denuklirisasi dan pencabutan sanksi ekonomi menjadi hambatan utama. KTT kedua Trump dan Kim, yang diadakan di Vietnam pada Februari 2019, gagal setelah kedua pemimpin tidak sepakat mengenai keringanan sanksi dan denuklirisasi. Trump mengatakan bahwa Kim setuju untuk membongkar fasilitas produksi nuklir dan bahan fisil di Yongbyon dengan imbalan keringanan sanksi sepenuhnya, tetapi presiden Amerika Serikat, Trump, menginginkan langkah yang lebih substansial dalam denuklirisasi dan verifikasi. Para pejabat Korea Utara membantah pernyataan Trump, dan mengatakan bahwa Kim hanya meminta keringanan sanksi parsial. Kedua pemimpin meninggalkan Vietnam lebih awal, tanpa menandatangani pernyataan bersama yang direncanakan. Trump mengatakan bahwa mereka berpisah dengan cara yang "bersahabat", sementara kementerian luar negeri Korea Utara memperingatkan bahwa mereka tidak akan mengubah posisinya dan menutup akses negosiasi dengan Amerika Serikat (Council on Foreign Relations, n.d.). Tiongkok terus mendukung Korea Utara secara ekonomi, yang mengurangi tekanan dari sanksi internasional. Di sisi lain, sikap keras Amerika Serikat yang menuntut denuklirisasi penuh sebelum pencabutan sanksi menambah kesulitan dalam mencapai kesepakatan.

Kemudian, adanya insiden-insiden seperti serangan propaganda dari kelompok pembelot. Pertengahan tahun 2020, Media pemerintah Korea Utara sempat mengumumkan bahwa negara tersebut akan menutup semua akses kontak dengan Korea Selatan setelah meminta Seoul untuk mencegah para aktivis mengirimkan selebaran anti-Pyongyang melintasi perbatasan. Beberapa hari kemudian, Korea Utara menghancurkan kantor penghubung bersama yang didirikan pada tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar-Korea. Korea Utara sempat memulihkan jalur komunikasi pada Agustus 2021, tetapi menutupnya lagi setelah Korea Selatan berpartisipasi dalam latihan militer dengan Amerika Serikat. Jalur komunikasi dipulihkan lagi pada bulan Oktober (Council on Foreign Relations, n.d.). Olehnya itu, tindakan Korea Utara yang meledakkan kantor penghubung menunjukkan bahwa ketegangan militer dan politik tetap tinggi, menggambarkan kerentanan proses perdamaian. Keputusan Korea Utara untuk terus mengembangkan program nuklirnya meskipun ditandatanganinya deklarasi menunjukkan bahwa kepentingan internal rezim dalam menjaga stabilitas dan legitimasi domestik lebih diutamakan dibandingkan dengan tekanan internasional.

Pembahasan

Evaluasi Efektivitas Deklarasi Panmunjom dalam Proses Denuklirisasi Semenanjung Korea

Deklarasi Panmunjom mencakup beberapa poin utama, termasuk komitmen untuk mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan denuklirisasi. Namun, meskipun terdapat optimisme awal, pelaksanaan deklarasi ini faktanya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu aspek kritis yang perlu dianalisis adalah sejauh mana deklarasi ini berhasil mengubah dinamika keamanan di Semenanjung Korea dan mendorong langkah konkret menuju denuklirisasi menyeluruh.

Beberapa tantangan utama dalam evaluasi efektivitas deklarasi ini adalah ketidakpercayaan mendalam antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta ketidakpastian mengenai komitmen Amerika Serikat dalam mendukung proses denuklirisasi. Ketegangan ini diperburuk oleh kebijakan nuklir Korea Utara yang agresif, yang memandang senjata nuklir sebagai alat utama untuk menjamin kelangsungan hidup rezimnya di tengah tekanan internasional dan sanksi ekonomi yang berat. Artikel di *Foreign Affairs* oleh Vincent Brooks dan Ho Young Leem

menekankan bahwa Kim Jong-un memandang senjata nuklir sebagai "aset militer, polis asuransi, dan sumber prestise yang besar" (Brooks & Leem, 2021).

Berdasarkan informasi media *The Diplomat*, pada tahun 2021, Kim Jong Un bahkan menyusun tujuan utama untuk memperkuat kekuatan pertahanan negaranya dengan mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir dan meningkatkan daya tembak rudal balistik antarbenua dengan jangkauan 15.000 kilometer. Miniaturisasi senjata nuklir, pembuatan senjata nuklir taktis, dan produksi hulu ledak nuklir super besar juga dimasukkan sebagai tujuan lainnya (Shin, 2021).

Poin evaluasi lainnya yang dapat dianalisis adalah adanya perbedaan mendasar dalam tujuan dan kepentingan strategis antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta negara-negara lain yang terlibat, seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok. Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman eksternal, terutama dari Amerika Serikat, yang terus mempertahankan kehadiran militernya di kawasan semenanjung korea. Selain itu, diberlakukannya sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan sekutunya memperburuk situasi. Korea Utara memandang pencabutan sanksi sebagai prasyarat untuk denuklirisasi, sementara Amerika Serikat menuntut langkah konkret denuklirisasi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan keringanan sanksi. Ketegangan ini menyebabkan kebuntuan dalam negosiasi, seperti yang terlihat dalam KTT kedua antara Donald Trump dan Kim Jong-un pada Februari 2019, yang berakhir lebih awal tanpa kesepakatan (Council on Foreign Relations, 2019).

Di sisi lain, peran Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama Korea Utara tidak bisa diabaikan. Tiongkok berperan sebagai penyeimbang dalam dinamika regional, mendukung stabilitas di Semenanjung Korea sambil memastikan kepentingannya sendiri di kawasan tetap terjaga. Terjadinya insiden meledaknya kantor penghubung antar-Korea pada tahun 2020 yang dilakukan Korea Utara sebagai tanggapan atas penyebaran propaganda anti-rezim oleh kelompok pembelot dari Korea Selatan menunjukkan bahwa komitmen untuk mengurangi ketegangan militer belum sepenuhnya terwujud. Potensi konflik nyata adanya dan ketidakstabilan terus berlanjut.

Dinamika internasional yang lebih luas, termasuk peran negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Jepang, serta pengaruh kebijakan Amerika Serikat di bawah berbagai administrasi perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang fluktuatif dan seringkali konfrontatif terhadap Korea Utara telah menjadi faktor penting dalam menghambat kemajuan denuklirisasi. Sebagai contoh,

perubahan pendekatan dari pemerintahan Trump ke pemerintahan Biden yang membawa implikasi berbeda bagi hubungan Amerika Serikat-Korea Utara dan upaya denuklirisasi.

Evaluasi juga perlu dilakukan dengan meninjau kembali keberhasilan dan kegagalan pertemuan puncak antara pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara. Misalnya, KTT Singapura pada 2018 antara Donald Trump dan Kim Jong-un membawa harapan baru, tetapi kurangnya langkah konkret dan ketiadaan tindak lanjut yang efektif membuat hasilnya diragukan. Sebaliknya, KTT kedua pada 2019 berakhir tanpa kesepakatan, menyoroti perbedaan besar dalam tuntutan dan ekspektasi dari kedua belah pihak.

Lebih lanjut, kebijakan proaktif dari pemerintahan Moon Jae-in, yang mencoba menjembatani kesenjangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat, menjadi elemen penting dalam analisis evaluasi ini. Pendekatan bilateral antara Korea Utara dan Korea Selatan penting, tetapi tidak cukup. Denuklirisasi harus melibatkan aktor-aktor utama lainnya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Jepang. Pembentukan kembali enam pihak dalam perundingan multilateral dapat memberikan platform yang lebih luas untuk menyelesaikan isu-isu kompleks.

Secara keseluruhan, penelitian "Evaluasi Efektivitas Deklarasi Panmunjom dalam Proses Denuklirisasi Semenanjung Korea" membutuhkan pendekatan multidimensional yang mencakup analisis historis, politik, dan keamanan. Efektivitas Deklarasi Panmunjom dalam mencapai denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea masih terbatas. Meskipun deklarasi ini berhasil menciptakan beberapa momentum diplomatik dan langkah-langkah awal menuju perdamaian, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada komitmen politik yang lebih kuat, penyelesaian masalah sanksi, dan peningkatan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

CONCLUSION

Isu keamanan yang terjadi di Semenanjung Korea memiliki kompleksitasnya tersendiri. Semenanjung Korea telah menjadi pusat perhatian internasional karena konflik berkepanjangan dan isu nuklir yang mengancam stabilitas regional dan global. Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953 melibatkan Korea Utara yang didukung oleh negara-negara komunis seperti Tiongkok dan Uni Soviet -kini Rusia, melawan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan PBB. Meskipun perang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, konflik ini belum resmi

berakhir, dan ketegangan masih sering terjadi di Semenanjung Korea, terutama terkait dengan program nuklir Korea Utara yang menimbulkan kekhawatiran global.

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani pada 27 April 2018 oleh pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan menjadi tonggak penting dalam upaya denuklirisasi dan peningkatan hubungan antar kedua negara. Deklarasi ini mencakup komitmen untuk mengakhiri permusuhan dan mencapai denuklirisasi menyeluruh (*complete denuclearization*) di Semenanjung Korea. Meskipun deklarasi ini menandai momentum positif, efektivitasnya dalam menggerakkan proses denuklirisasi mendapat respon skeptis karena rekam jejak Korea Utara yang mencerminkan ketidakpatuhan dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi implementasi deklarasi.

Penelitian ini menggunakan Teori *Regional Security Complex*, menganalisis berbagai aspek penting dari Deklarasi Panmunjom. Teori ini menekankan keterkaitan dan interdependensi keamanan di antara negara-negara dalam suatu kawasan geografis tertentu, yang mempengaruhi dinamika konflik dan kerja sama. Deklarasi Panmunjom dianalisis sebagai upaya menciptakan keamanan bersama di kawasan ini, namun implementasinya sering terganggu oleh ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, dinamika politik domestik dan internasional, serta kepentingan strategis yang berbeda.

Dalam evaluasi efektivitas Deklarasi Panmunjom, berbagai tantangan utama diidentifikasi, termasuk ketidakpercayaan mendalam antara Korea Utara dan Korea Selatan serta ketidakpastian mengenai komitmen Amerika Serikat dalam mendukung proses denuklirisasi. Kebijakan nuklir Korea Utara yang agresif, pandangan strategis yang berbeda, dan peran negara-negara lain seperti Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama Korea Utara turut mempengaruhi dinamika ini. Insiden seperti serangan propaganda dan penghancuran kantor penghubung menunjukkan bahwa ketegangan militer dan politik tetap tinggi.

Meskipun Deklarasi Panmunjom merupakan langkah penting menuju perdamaian dan denuklirisasi, efektivitasnya terbatas oleh perbedaan kepentingan strategis, kebijakan yang bertentangan, dan dinamika regional yang kompleks. Untuk mencapai denuklirisasi yang nyata, diperlukan pendekatan multilateral yang lebih terkoordinasi dan upaya diplomatik yang lebih kuat untuk menjembatani perbedaan tersebut. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika keamanan regional dan perlunya komitmen yang lebih besar dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea.

REFERENCES

- Agence France-Presse. (2018). PANMUNJOM DECLARATION: THE KEY POINTS. Dhaka Tribune. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.dhakatribune.com/world/pacific-oceania/144393/panmunjom-declaration-the-key-points>
- Al Jazeera. (2020). NORTH KOREA BLOWS UP LIAISON OFFICE AS TENSIONS RISE WITH SOUTH. Al Jazeera. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/16/north-korea-blows-up-liaison-office-as-tensions-rise-with-south>
- Atsuhito, I. (2020). THE BIDEN ADMINISTRATION AND NORTH KOREA. The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine. Retrieved June 10, 2024, from <https://thediplomat.com/2020/12/the-biden-administration-and-north-korea/>
- BBC News Indonesia. (2018). ASIAN GAMES 2018: KOREA BERSATU RAIH EMAS PERTAMA MEREKA DALAM SEJARAH. BBC. Retrieved June 13, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/olahraga-45318902>
- Brooks, V., Leem, H. Y., & BROOKS, V. (2021). A GRAND BARGAIN WITH NORTH KOREA. Foreign Affairs. Retrieved June 8, 2024, from <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-07-29/grand-bargain-north-korea>
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). REGIONS AND POWERS. Cambridge University Press. 10.1017/cbo9780511491252.007
- CNN Indonesia. (2018). KORUT-KORSEL GENGAM BERSAMA BENDERA UNIFIKASI DI ASIAN GAMES. CNN Indonesia. Retrieved June 19, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20180818213945-178-323288/korut-korsel-gengam-bersama-bendera-unifikasi-di-asian-games>
- Council on Foreign Relations. (2018). TIMELINE: NORTH KOREAN NUCLEAR NEGOTIATIONS. Council on Foreign Relations. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations>
- Farzayee, S. (2023). FROM STATE-CENTRIC TO SECURITY COMPLEXES: A REVIEW OF REGIONAL SECURITY COMPLEX THEORY IN INTERNATIONAL RELATIONS. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 6(2). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.4560>

- Folia, R. (2020). DEKLARASI PANMUNJOM TERJADI 2 TAHUN LALU, APA DAMPAKNYA SEKARANG? IDN Times. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.idntimes.com/news/world/rosa-fofia/deklarasi-panmunjom-terjadi-2-tahun-lalu-apa-dampaknya-sekarang?page=all>
- Herina, S. N., Widhiyoga, G., & Wijayati, H. (2022). ALASAN KOREA SELATAN MERATIFIKASI DEKLARASI PANMUNJOM TAHUN 2018. *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 3.
- Kartini, I. (2018). DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA ... | Indriana Kartini | 1 DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(1). https://www.researchgate.net/publication/328767015_Deklarasi_Panmunjom_dan_Prospek_Perdamaian_Korea_di_Era_Moon_Jae-In_dan_Kim_Jong-Un
- Lam'anah, N., & Alfian, M. F. (2023). ANALISIS KETIDAKEFEKTIFAN DEKLARASI PANMUNJOM SEBAGAI UPAYA REUNIFIKASI SEMENANJUNG KOREA. *Journal of International Relations*, 9(2), 127-139. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Millett, A. R. (2023). KOREAN WAR - INVASION, COUNTERINVASION, 1950-51. *Britannica*. Retrieved June 10, 2024, from <https://www.britannica.com/event/Korean-War/Invasion-and-counterinvasion-1950-51>
- Mudji, D. A., Sebayang, T. R., & N, F. I. (2022). MOTIF PERILAKU KOREA UTARA MENINGKARI DEKLARASI PANMUNJOM DITINJAU DARI REGIONAL SECURITY COMPLEX THEORY. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 7(2). https://repository.unpas.ac.id/61291/1/SINTA%206_Journal%20Published_Politer%20Tino%20Rila%20Sebayang.pdf
- Permata, I. M. (2018). ANALISIS KONSTRUKTIVISME: PERILAKU KOREA UTARA TERHADAP DENUKLIRISASI. *Andalas Journal of International Studies*, VII(2). <https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.104-116.2019>
- Reuters. (2018). PANMUNJOM DECLARATION FOR PEACE, PROSPERITY AND UNIFICATION OF THE KOREAN PENINSULA. *Reuters*. Retrieved June 12, 2024, from <https://www.reuters.com/article/idUSKBN1HY193/>

- Sari, M., & Asmendri. (2020). PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN IPA. NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41-53. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>
- Shin, M. (2021). KIM JONG UN DECLARES NORTH KOREA WILL ADVANCE NUCLEAR CAPABILITIES. The Diplomat. Retrieved June 10, 2024, from <https://thediplomat.com/2021/01/kim-jong-un-declares-north-korea-will-advance-nuclear-capabilities/>
- Smith, J. (2021). EXPLAINER: S.KOREA SEES PEACE DECLARATION AS KEY TO RESTARTING N.KOREA TALKS. Reuters. Retrieved June 12, 2024, from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-sees-peace-declaration-key-restarting-nkorea-talks-2021-10-27/>
- Snyder, S. A. (2022, July 27). WHAT TO KNOW ABOUT SANCTIONS ON NORTH KOREA. Council on Foreign Relations. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.cfr.org/backgrounder/north-korea-sanctions-un-nuclear-weapons#chapter-title-0-4>
- Suhardi, Kasito, & Samsuarki. (2022). ANALISIS PERANG KOREA TAHUN 1950-1953 DARI ASPEK STRATEGI DAN MANFAATNYA BAGI TNI AL. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(1), 271-278. DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.271-278